

Potret Kriminalitas Polres Metropolitan Jakarta Utara

TREN kejahatan pencurian berat (Curat) masih mendominasi aksi kejahatan yang terjadi di wilayah Jakarta Utara. Bahkan peningkatan angka tindak kejahatan pencurian berat itu hingga kini masih terus mewarnai potret kriminal yang terjadi di wilayah ini.

GUNA menekan angka aksi kejahatan itu, Polres Metropolitan Jakarta Utara telah melakukan berbagai upaya penindakan. Bahkan aparat kepolisian kini tak segan-segan memberlakukan aksi tembak di tempat terhadap para pelaku aksi kejahatan yang beraksi di wilayah itu.

Sebagai bukti keseriusan dalam menindak para pelaku kejahatan, Polres Metropolitan Jakarta Utara dalam waktu 30 jam telah menembak mati dua dari lima anggota kelompok perampok nasabah bank yang baru-baru ini beraksi di kasawan Sunter Jakarta Utara.

"Jadi, kita tidak main-main dalam hal penegakan hukum. Siapa saja yang melanggar hukum pasti kita tindak, tanpa terkecuali. Dan khusus bagi penjahat tidak ada kompromi. Buktinya, lima pelaku perampok bank di Sunter dalam tempo 30 jam kita tembak, dua diantaranya bahkan mati di tempat," tegas Kapolres Metropolitan Jakarta Utara Kombes Pol Drs Musyafak.

Berdasarkan data presentase catatan kriminal Polres Metropolitan Jakarta Utara dari Januari



Kombes Pol Drs Musyafak

2006 hingga April 2006, angka kejahatan tindak pencurian berat mencapai 381 kasus dari jumlah keseluruhan berbagai aksi kejahatan yang terjadi dan kini masih ditangani aparat sekitar 203 kasus.

Sementara urutan kedua didominasi oleh aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) sekitar 366 kasus dengan rincian 284 kasus curanmor roda dua dan 284 kasus curanmor roda empat. Aksi kejahatan penipuan kemudian berada pada posisi ketiga dengan jumlah total mencapai 331 kasus.

Sedangkan aksi penyalahgunaan narkoba berada pada posisi keempat dengan jumlah 237 kasus. Urutan kelima tindak kejahatan

penggelapan 200 kasus, aksi pencurian dengan kekerasan (Curas) masuk peringkat enam dengan jumlah 125 kasus dengan rincian 62 kasus perampasan dan 63 kasus penodongan.

Aksi kejahatan penganiayaan berat (Anirat) masuk urutan ketujuh sekitar 119 kasus dan kasus senjata tajam (Sajam) sekitar 77 kasus pada urutan kedelapan. Sementara untuk pengungkapan kasus perjudian di Jakarta Utara mencapai sekitar 72 kasus, pemerasan 33 kasus, dan pembunuhan 6 kasus.

Jumlah keseluruhan angka tindak kejahatan tersebut diperoleh berdasarkan laporan bulanan yang masuk ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Di antaranya 501 kasus pada bulan Januari, 482 kasus Februari, 538 kasus Maret dan 502 kasus pada bulan April.

Polres Metropolitan Jakarta Utara sejauh ini telah berhasil mengungkap sebanyak 695 atau sekitar 40 persen dari 2023 kasus aksi kejahatan yang terjadi. Dengan rincian 189 kasus diselesaikan pada bulan Januari, 175 kasus Februari, 163 kasus Maret dan 168 kasus diselesaikan pada bulan April.

PENCANANGAN 4T

Kendati demikian Kapolres Metropolitan Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Musyafak, menghimbau agar jajarannya tetap mematuhi prosedur-prosedur yang berlaku dalam rangka penegakan hukum. Setiap anggota diminta agar lebih mengedepankan HAM dalam melakukan penindakan.

Sejumlah kebijakan bahkan telah

dicanangkan sebagai pedoman agar anggotanya tidak terjebak dalam pelanggaran HAM. Di antaranya kebijakan 4 Tepat yakni, tepat sasaran, tepat target yang diincar, tepat pada barang bukti dan tepat prosedur.

"Agar dipatuhi kebijakan ini sudah saya sosialisasikan kepada anggota, baik secara lisan maupun tertulis. Bahkan kebijakan ini sudah saya serahkan kepada Kapolda. Kebijakan ini bertujuan agar anggota tidak melanggar HAM. Artinya, anggota harus tepat sasaran ketika melakukan tindakan (menembak)," tegasnya.

Polres Metropolitan Jakarta Utara juga telah membentuk kring serse dengan menempatkan satu tim, masing-masing terdiri dari 9 orang untuk ditempatkan di enam polsek yang ada. Bahkan untuk mendukung kebijakan itu, seluruh jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) telah diploting habis ke dalam tim itu.

Demikian juga halnya dengan satuan yang lain. Sebagian Unit Buser Resmob bahkan kini diharuskan untuk selalu mobile. Dalam bertindak setiap satuan diminta tetap melakukan koordinasi dengan satuan yang lain agar setiap upaya penindakan hukum berlangsung efektif.

"Dengan memberlakukan kring serse ini kita berharap aksi kejahatan di sini akan berkurang. Nah, bila aksi kejahatan dapat ditekan tentu laporan kita setiap bulan ke Polda akan membaik. Intinya, mari kita berlomba-lomba dalam konteks positive," kata Musyafak.

Berkaitan dengan berhasil tidaknya sebuah kebijakan sudah barang tentu tergantung pada kepemimpinan pemberi kebijakan itu sendiri. Seorang pemimpin harus mampu mengimplementasikan kebijakan dengan memberikan keteladanan kepada semua anggota.

Untuk mencapai sebuah kesuksesan bahkan seorang pemimpin yang bijak harus turun langsung ke lapangan mendampingi para anggotanya. Bukan hanya sekedar di lapangan, seorang pemimpin juga seogyananya harus memimpin lang-

sung operasi penegakan hukum yang diterapkannya.

"Kita tidak hanya memberikan kebijakan saja. Saya sendiri sebagai pimpinan harus memberikan teladan bagi anggota. Sebagai pimpinan kita juga jangan arogan. Artinya keteladanan lebih berharga ketimbang hanya memberikan arahan saja. Konkritnya, kita suruh mereka sholat tentu kita juga harus sholat juga," ungkap Musyafak.

Sampai saat ini jumlah personil Polres Metropolitan Jakarta Utara mencapai 1738 anggota. Idealnya, dengan wilayah yang terdiri dari 6 kecamatan dan 31 kelurahan jumlah personil riilnya mencapai di atas 2 ribuan. Kendati demikian, dengan personil yang ada, Polres Metropolitan Jakarta Utara berusaha memobilisir semua kekuatan agar tetap mampu mengatasi berbagai dinamika yang terjadi.

Di satu sisi, dalam keterbatasan personil Polres Jakarta Utara justru

mengalami *overload* kepengkatan. Akibatnya, sekitar 9 perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) hingga kini tidak mendapat jabatan. Ironisnya, mereka melaksanakan tugas sesuai pangkat, namun tidak mendapat tunjangan jabatan.

Di sisi lain, kemampuan personil polda pada jenjang pangkat Ipda dan Iptu, termasuk di Polres Metropolitan Jakarta Utara dianggap masih kurang. Kedua masalah ini juga merupakan sebuah pekerjaan rumah yang harus sesegera mungkin ditangani untuk dikaji ulang.

"Untuk mengatasi *overload* ini memang sudah dirapatkan di Polda. Kasihan, mereka bekerja tapi tidak memiliki jabatan apa-apa. Sebagai solusi, pangkat kanit di polsek-polsek akan ditingkatkan menjadi AKP. Nah, tentu peningkatan pangkat jabatan kanit ini akan membawa dampak bagi masing-masing polsek," kata Musyafak. [cil]



Polres Metro Jakarta Utara